

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mendapatkan masukan tentang dampak reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang tingkat kepuasan para pemangku kepentingan sebagai dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada para pemangku kepentingan yang mendapatkan pelayanan dari LKPP; dan
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP 2016.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretariat Reformasi Birokrasi LKPP;
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
5. PPK Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA SURVEI
STAKEHOLDER EKSTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI LKPP TAHUN 2016

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SURVEI STAKEHOLDER EKSTERNAL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2016

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Koordinator	Gusti Prabangasta	400.000
2	Sekretaris	Andre Yamme Resa B	300.000
3	Anggota	Citra Destrianindya P	300.000
		Aprian Mustofa Hasan	300.000
		Rosadilah H P	300.000
		Ketua ULP Kota Bukittinggi	300.000
		Sekretaris ULP Kota Bukittinggi	300.000
		Ketua LPSE Kota Bukittinggi	300.000
		Sekretaris LPSE Kota Bukittinggi	300.000
		Ketua ULP Kab Simalungun	300.000
		Sekretaris ULP Kab Simalungun	300.000
		Ketua LPSE Kab Simalungun	300.000
		Sekretaris LPSE Kab Simalungun	300.000
		Ketua ULP Kota Cilegon	300.000
		Sekretaris ULP Kota Cilegon	300.000
		Ketua LPSE Kota Cilegon	300.000
		Sekretaris LPSE Kota Cilegon	300.000
		Ketua ULP Kota Depok	300.000
		Sekretaris ULP Kota Depok	300.000
		Ketua LPSE Kota Depok	300.000
		Sekretaris LPSE Kota Depok	300.000

	Ketua ULP Kab Kebumen	300.000
	Sekretaris ULP Kab Kebumen	300.000
	Ketua LPSE Kab Kebumen	300.000
	Sekretaris LPSE Kab Kebumen	300.000
	Ketua ULP Kota Malang	300.000
	Sekretaris ULP Kota Malang	300.000
	Ketua LPSE Kota Malang	300.000
	Sekretaris LPSE Kota Malang	300.000
	Ketua ULP Kota Palangkaraya	300.000
	Sekretaris ULP Kota Palangkaraya	300.000
	Ketua LPSE Kota Palangkaraya	300.000
	Sekretaris LPSE Kota Palangkaraya	300.000
	Ketua ULP Kab Nunukan	300.000
	Sekretaris ULP Kab Nunukan	300.000
	Ketua LPSE Kab Nunukan	300.000
	Sekretaris LPSE Kab Nunukan	300.000
	Ketua ULP Kota Gorontalo	300.000
	Sekretaris ULP Kota Gorontalo	300.000
	Ketua LPSE Kota Gorontalo	300.000
	Sekretaris LPSE Kota Gorontalo	300.000
	Ketua ULP Kota Bekasi	300.000
	Sekretaris ULP Kota Bekasi	300.000
	Ketua LPSE Kota Bekasi	300.000
	Sekretaris LPSE Kota Bekasi	300.000
	Ketua ULP Kota Ambon	300.000
	Sekretaris ULP Kota Ambon	300.000
	Ketua LPSE Kota Ambon	300.000
	Sekretaris LPSE Kota Ambon	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA